

KERJASAMA GIRLS NOT BRIDES DAN PEMERINTAH BANGLADESH

DALAM PENANGANAN PERNIKAHAN DINI DI BANGLADESH

TAHUN 2014-2016



Nama :

Siti Subeqiyatun Attitoh

20150510322

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

KERJASAMA GIRLS NOT BRIDES DAN PEMERINTAH BANGLADESH

DALAM PENANGANAN PERNIKAHAN DINI DI BANGLADESH

TAHUN 2014-2016

Siti Subeqiyatun Attitoh

20150510322

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Abstrak

Girls Not Brides is a non-governmental organization that focuses on early marriage. This organization works with civil society, grassroots organizations from the local to international level and the government, one of them is the Government of Bangladesh. Bangladesh is a country that is listed as the 3rd country with the highest rate of early marriage in the world. Factors that support early marriage in this country include poverty, natural disasters, lack of educational facilities, sexual harassment. Ratifying the Child Marriage Restraint Act 1929, which contains the minimum marriage age for women of 18 years and CEDAW in fact does not have an effect on the practice of early marriage in Bangladesh. To end with the early marriage, GNB came to Bangladesh in collaboration with the Government of Bangladesh.

Key words: GNB, Bangladesh Government, Child Marriage, Collaboration

A. Latar Belakang Masalah

Girls Not Brides atau GNB merupakan suatu organisasi non pemerintah yang bermarkas di Inggris yang memiliki fokus utama untuk menghentikan pernikahan dini yang ada di dunia dengan berlandaskan UN Convention on Right of Child. Pada awal berdirinya GNB merupakan anak dari organisasi The Edlers namun pada tahun 2013 secara resmi menjadi organisasi independen dan menyebar di beberapa kawasan negara berkembang seperti Asia, Afrika dan Middle East dengan memiliki

lebih dari 1000 kerjasama dengan masyarakat sipil maupun NGO lokal serta pemerintah lebih dari 95 negara (Ekert, 2014). Kerjasama yang dilakukan GNB sendiri menggunakan beberapa cara yaitu diskusi terbuka, fasilitasi, mobilisasi, serta pendanaan demi terhapusnya pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena dimana anak-anak baik laki-laki maupun perempuan menikah dibawah usia yang telah ditentukan oleh pemerintah. Fenomena ini menyebabkan melonjaknya jumlah penduduk, merugikan secara fisik

,psikis para korban pernikahan dini yang menyebabkan adanya kematian, berhentinya sekolah hingga trauma dikarenakan pemaksaan (Patton, 2012)

Menurut UNICEF, pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan dibawah usia 18 tahun baik yang terjadi oleh laki-laki maupun perempuan. Dimana pernikahan seorang anak laki-laki maupun perempuan yang terjadi merupakan pelanggaran instrumen hukum internasional serta melanggar hak asasi anak. Ataupun tinggal bersama dengan anak yang berusia dibawah umur dengan seolah-olah menjadikan pasangan sebagai suami ataupun istri. Perbuatan tersebut juga tergolong sebagai pelanggaran hak asasi anak yang mana lebih banyak terjadi pada anak perempuan (UNICEF, Child Marriage, 2015).

Menurut data dari GNB, sebanyak 15 juta perempuan muda menikah dibawah usia 18 tahun. Sehingga dapat dihitung bahwa sebanyak 4 orang perempuan muda menikah setiap harinya di seluruh belahan dunia. Tercatat sebanyak 45% perempuan muda di kawasan Asia Selatan menikah, 39% di kawasan sahara Afrika, 23% di

Amerika Latin dan Caribbean, serta 18 % pada kawasan timur tengah. Pernikahan dini ini tidak hanya menyangkut adat yang dipercayai oleh suatu etnic atau kepercayaan tertentu. Namun pernikahan dini ini tidak meliputi etnic, budaya maupun kepercayaan yang dipegang oleh etnis kawasan tersebut (UNICEF, The State of the World's Children, 2016).

Bangladesh merupakan salah satu Negara kawasan Asia Selatan yang termasuk Negara termiskin ke 13 menurut web The Focus Economic dengan GDP 1371.748 per kapital pada tahun 2016 (Economics, 2018). Tidak hanya negaranya yang miskin namun negara ini juga masih memiliki *mainset* dimana perempuan merupakan pemberat bagi kehidupan keluarga. Sehingga keluarga yang memiliki anak perempuan menggunakan anaknya untuk meringankan beban hidup mereka dengan memaksa menikah di usia dini (Brides, Child marriage around the world: BANGLADESH, 2018).

Pernikahan dini sudah terjadi di Negara Bangladesh sejak tahun 1900 an, hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa

faktor seperti kemiskinan. Pada tahun 2010 sebanyak 31.5 persen penduduk Bangladesh berada dalam zona kemiskinan. Tentunya faktor kemiskinan juga mendorong orang tua untuk memaksa anak khususnya anak perempuan untuk menikah dikarenakan orang tua beranggapan jika anaknya menikah maka tidak akan lagi menyusahkan kehidupan keluarga mereka dan dapat membantu perekonomian keluarga sang wanita (Malhotra, 2010).

Negara ini juga tercatat sebagai Negara kedua yang menduduki tingkat pernikahan dini terbanyak di dunia. Menurut UNICEF pada tahun 2013 sebanyak 29 persen perempuan menikah dibawah 15 tahun dan 65 persen menikah dibawah 18 tahun. Tentunya hal ini berpengaruh pada kematian ibu pada saat melahirkan, anak yang menikah pada rentan usia 10-14 tahun 5 dari ibu yang melahirkan meninggal dan pada usia 15-19 tahun, dua dari ibu yang melahirkan meninggal lebih banyak daripada ibu yang berusia 20-25 tahun (Watch H. R., 2013).

Pada tahun 2014, Bangladesh tercatat sebagai negara dengan tingkat pernikahan

dini tertinggi di kawasan Asia Selatan sebanyak 65 %. Dimana perempuan yang berusia 20-24 tahun, tiga diantaranya telah menikah pada usia 15 tahun (Featherstone, 2014). Dibawah pimpinan Abdul Hamid , Bangladesh membuat suatu konferensi yang disebut sebagai *Bangladesh Girl Summit in 2014*. Pada pertemuan ini, Meher Afroze Chumki selaku Menteri Kementrian Perempuan dan Anak Bangladesh mengatakan :

“Tujuh puluh persen wanita yang menjadi korban penyiksaan di Bangladesh dari rentang usia 13-18 tahun. Pernikahan dini merupakan hal yang sangat berpengaruh pada keterampilan kerja, yang akhirnya mempengaruhi situasi hak asasi manusia secara keseluruhan. Oleh sebab itu, Pemerintah Bangladesh menjadikan pernikahan dini sebagai tantangan utama yang harus diakhiri” (BRAC, *Bangladesh Girl Summit 2014 Pledges concerted effort to end child marriage*, 2014).

Kasus pernikahan dini yang setiap tahun meningkat tentunya membuat dampak yang tidak baik di Negara Bangladesh itu sendiri dalam hal politik, kesehatan dan ekonomi. Bangladesh sendiri sebagai negara yang memiliki tingkat presentase kenaikan sebanyak 10 persen perempuan di anggota legislatif dalam kurun waktu 17 (1990-2017) tahun

(Union, 2017), nyatanya tidak memberikan ruang terhadap perempuan dalam berpendapat maupun bekerja sesuai porsinya ranah legislative. Selina Jahan Lita sebagai salah satu anggota legislative Bangladesh mengatakan:

“kami tidak memiliki peran khusus dalam pekerjaan, dan kami pun tidak mendapat instruksi khusus dari pemerintah di bidang mana kami akan bekerja” (Farhin, 2018).

Menurut IWHC (*International Women's Health Coalition*) perempuan yang menikah diusia dibawah 15 tahun cenderung memiliki resiko untuk terkena gangguan dalam kehamilan, meninggal pada saat pendarahan, dan penyakit-penyakit lainnya sehingga para suami meninggalnya istri-istrinya (Roy & Sarker, 2016). Keadaan perempuan dan anak-anak sebagai korban pernikahan dini semakin miris ditambah dengan kemiskinan yang terjadi. Telah disebutkan diatas bahwa Bangladesh menempati negara termiskin ke 13 dengan GDP 1371.748 per capital, wanita sebagai aktor ekonomi mendapatkan diskriminasi dan stigma yang berkaitan dengan status mereka di kehidupan *patriarchy* (Khatun, Khan, Pervin, & Jahan, 2005).

Sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms Discrimination Against Women*) pada tahun 1984 dan *Child Marriage Restraint Act* pada tahun 1929. Nyatanya tidak memberikan dampak lebih pada pengurangan jumlah angka pernikahan dini yang terjadi di Bangladesh. Ketidakmampuan dalam penanganan pernikahan dini membawa INGO/ NGO yang ada di Bangladesh untuk menanganinya dengan membawa visi untuk memberantas pernikahan dini. Tentunya menyorot salah satu INGO yaitu Girls Not Brides. Girls Not Brides mulai masuk ke Bangladesh pada tahun 2014. Pada awal tahun masuknya INGO ini berfokus pada pemberdayaan perempuan dan menjunjung kesetaraan wanita dalam hal sosial maupun ekonomi. Tak lupa INGO ini juga menggandeng pemerintah dalam penanganan pernikahan dini yang ada di Bangladesh.

Pemerintah Bangladesh pun ikut bergabung dengan GNB, Pada tahun yang sama, bertepatan dengan adanya *Bangladesh Girl Summit in 2014*, yang mana pemerintah menggandeng INGO

ataupun NGO serta pakar ahli untuk menemukan langkah yang tepat dalam penanganan pernikahan dini yang terjadi di Bangladesh. Tentunya hal ini untuk menekan jumlah pernikahan dini dan membuat regulasi dalam penanganan pernikahan dini. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh dengan membuat UU dengan mengubah usia minimum pernikahan yaitu dari usia 18 tahun menjadi 16 tahun. Hal ini bertujuan agar perempuan muda juga dapat mengenyam pendidikan yang layak sehingga meminimalisir pemaksaan di dalam suatu keluarga (Brides, Bangladesh goverment reduce the minimum age's marriage from 18 to 16, 2014).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diambil:

Bagaimana bentuk kerjasama Girls Not Brides dan Pemerintah Bangladesh dalam penanganan pernikahan dini di Bangladesh?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami dan mengetahui bentuk dari kerjasama INGO Girls Not

Brides dan Pemerintah Bangladesh maka penulis menggunakan landasan berpikir:

1. Konsep pola relasi NGO-pemerintah

James V. Ryker dalam Hadi (Hadi & Nurmandi, 2017) mengungkapkan dengan baik mengenai masalah ini. Menurutnya ada lima model hubungan antara NGO dengan pemerintah yang pernah dipraktikkan di berbagai Negara:

- a. Autonomous/Benign Neglet. Dalam konteks hubungan yang seperti ini, pemerintah tidak menganggap NGO sebagai ancaman, karena itu membiarkan NGO bekerja secara independen atau mandiri. Sehingga, NGO dapat menikmati jalannya operasional tanpa adanya intervensi pemerintah.
- b. Facilitation/Promotion. Pemerintah menganggap kegiatan NGO sebagai sesuatu syarat yang bersifat komplementer.

Pemerintahlah yang menyiapkan suasana yang mendukung bagi NGO untuk beroperasi. Dukungan yang bersifat organisasional diberikan pemerintah dengan memberikan pengakuan yang lebih besar atas legitimasi NGO. Tak jarang pula pemerintah memberikan dukungna secara financial guna memudahkan operasional sebuah NGO agar berjalan dengan baik. Sementara itu, dukungan yang berupa administratif diwujudkan dengan menciptakan forum bagi pemerintah dan NGO dalam berbagai tingkat, guna membahas secara intensif berbagai persoalan yang merupakan kepedulian bersama.

c. Collaboration/Promotion.

Kerjasama ini bersifat menguntungkan antara kedua belah pihak. Karena, adanya

visi misi yang sama untuk menggapai sebuah tujuan. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk dukungan non finansial, misalnya dengan melakukan pelatihan. Sebaliknya, pemerintah menyediakan jaringan dukungan kegiatan bagi NGO. Yang terakhir, kerjasama dapat berbentuk forum bersama yang melibatkan kalangan NGO dan pemerintah, guna membahas hal-hal yang menjadi kepedulian bersama

d. Cooptation/Absorption.

Pemerintah mencoba menjaring dan mengarahkan kegiatan NGO dengan mengatur segala aktifitas mereka. Tidak jarang pemerintah melakukan kontrol secara aktif. Untuk itu, kalangan NGO harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

e. Containment/Sabotage/Disso- lution. Pemerintah melihat NGO merupakan tantangan ataupun sebagai ancama. Sehingga pemerintah membatasi ruang gerak NGO, kadang pemerintah juga membubarkan NGO yang dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku dinegara nya.

Bentuk kerjasama GNB- Pemerintah Bangladesh dalam hal ini termasuk dalam bentuk ketiga yaitu Collaboration. Dalam hal ini GNB maupun pemerintah saling bekerjasama dalam penanganan pernikahan dini. Seperti *conference Bangladesh Girl Summit in 2014* yang merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah dan NGOs/INGOs yang berada di Bangladesh untuk menciptakan suatu gagasan bersama ataupun langkah yang tepat guna mengurangi jumlah angka pernikahan dini serta mengangkat hak-hak perempuan

(BRAC, Bangladesh Girl Summit 2014 Pledges concerted effort to end child marriage, 2014).

2. Konsep kovensi perlindungan anak dan perempuan

Konsep konvensi perlindungan anak dan perempuan merupakan suatu konsep yang tercermin dari Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* merupakan bentuk adopsi dari Deklarasi Hak Anak pada tahun 1924 di Geneva. Dalam konvensi ini memiliki empat prinsip umum yang mendasari yaitu, 1) non diskriminasi, yang berarti bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensinya dalam segala situasi dan di setiap saat; 2) kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan suatu keputusan yang berdampak pada anak; 3) hak untuk kelangsungan hidup dan hak untuk mengembangkan potensi yang ada

pada diri anak; 4) penghargaan terhadap partisipasi anak untuk mengekspresikan diri karena anak memiliki hak untuk didengar dan dihormati, serta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat sesuai pandangan mereka tentang keputusan yang berdampak pada diri mereka.

Konvensi Hak Anak berisi aturan yang harus dipenuhi oleh negara, orang tua, masyarakat serta anak itu sendiri mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural bagi anak-anak. Konvensi ini memuat 54 pasal yang menetapkan sebuah standar kehidupan yang layak dan terlindungi dari segala macam ancaman, berguna untuk memajukan kesejahteraan anak-anak. Adapun pasal-pasal yang tentang perlindungan anak dan perempuan terkait perlindungan dari pernikahan dini antara lain:

- 1) Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “States Parties

shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, or family members”.

- 2) Pasal 12 ayat 1 “States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child”.
- 3) Pasal 19 ayat 1 dan 2 “States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social

and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child". "Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of

instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement".

- 4) Pasal 34 "States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent: (a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity; (b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices; (c) The exploitative use of children in pornographic performances and materials.

Pemberdayaan perempuan menjadi hal yang penting di segi ekonomi maupun sosial dan perlindungan yang berupa diskusi terbuka, fasilitasi dan mobilitasi. Diskusi terbuka dilakukan untuk menyerap saran maupun pendapat para perempuan terutama anak perempuan terhadap isu pernikahan dini baik itu yang telah mengalami dan belum mengalaminya. Fasilitasi yang diberikan dalam penanganan isu ini diantaranya cek kesehatan, pendidikan terhadap perempuan, bimbingan konseling. Mobilisasi dalam hal ini dilakukan tidak hanya terfokus pada perempuan dan anak saja tetapi juga di lingkungan keluarga, komunitas, dan para petinggi agama yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan konsekuensi terhadap bahaya pernikahan dini serta mampu untuk mengubah norma-norma yang berlaku (Brides, HOW CAN WE END CHILD MARRIAGE?).

D. Hipotesa

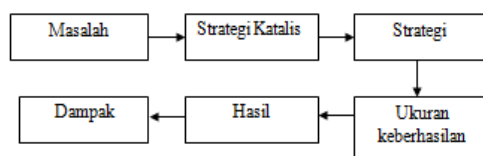
Dalam menangani kasus pernikahan dini yang ada di Bangladesh, *Girls Not Brides* dan Pemerintah Bangladesh melakukan kerjasama berupa kolaborasi kebijakan yang berbentuk mengadakan konferensi terkait pernikahan dini.

E. Hasil Penelitian

1. *Workshop Theory of Change* merupakan workshop yang diinisiasikan oleh UNPFA (*United Nations Population Fund*) , *Plan Bangladesh* dan dikembangkan serta difasilitasi oleh Kantor Regional Asia untuk Pusat Penelitian Wanita. Workshop ini mengundang INGO dan NGO serta pemerintah Bangladesh untuk penanganan pernikahan dini. Hal ini bertujuan agar pemerintah maupun NGO/ INGO serta pihak berkepentingan lainnya saling bertukar pendapat, ide, data-data, pengalaman serta tantangan dalam mengatasi pernikahan dini (UNPFA, ICRW, & Bangladesh, 2014).

Dalam Workshop ini Pemerintah Bangladesh diwakili oleh Ashraf Hossain dan Tariq ul Islam sebagai perwakilan dari Kementrian Perempuan dan Anak Bangladesh, Abu Ahmed Jamadar sebagai perwakilan dari Kementerian Hukum, Kehakiman, dan Urusan Parlemen Bangladesh (UNPFA, ICRW, & Bangladesh, 2014, pp. 22-24).

Dari hal ini GNB menggambarkan terdapat terdapat 4 hal yang dapat dan mampu untuk mengakhiri pernikahan dini seperti perempuan, keluarga dan komunitas, pelayanan, hukum dan politik. GNB juga membuat suatu pola untuk mengakhiri pernikahan dini, berikut alur theory of change menurut GNB:



Pemerintah Bangladesh mencerminkan *Theory of Change* ini dalam kebijakan yang telah dibuatnya seperti:

- a. Strategi Untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
- b. Pengaturan Hukum Dan Fasilitas Hukum
- c. Kepedulian Sosial Dan Transformasi Metal
- d. Kemajuan Sosial- Ekonomi Bagi Perempuan Dan Anak
- e. Layanan Perlindungan
- f. Pencegahan dan Perlindungan
- g. Langkah-Langkah Institusional Dan Strategi Penerapan Rencana Aksi Nasional.

2. *Girls Summit 2014*

Girls Summit 2014 merupakan sebuah konferensi internasional yang diadakan di Inggris. Konferensi ini merupakan inisiasi pertama Pemerintah Inggris dan UNICEF yang diselenggarakan pada bulan Juli 2014. Dalam konferensi ini membahas tentang langkah untuk mengakhiri pemotongan alat kelamin/mutilasi alat kelamin pada perempuan dan anak serta membahas tentang pemaksaan pernikahan dini

yang terjadi pada perempuan dan anak (Gov UK, 2014).

Sheikh Hasina sebagai perwakilan dari Pemerintah Bangladesh dan merupakan satu-satunya kepala negara yang diundang dalam *event* ini berkomitmennya untuk mengakhiri pernikahan dini, anak yang berusia dibawah 15 tahun pada tahun 2021 dan anak dengan usia dibawah 18 tahun pada tahun 2041 (Orange, 2015). Dalam kesempatan itu Sheikh Hasina berpidato bahwa:

“kami telah mengambil sebuah langkah yang mana anak-anak perempuan kami harus di didik dengan benar, Undang-undang dan hukum yang ketat tidak cukup dalam penanganan pernikahan dini terlebih dinegara miskin, oleh sebab itu perempuan investasi pendidikan serta pemberdayaan perempuan perlu dilakukan sehingga mereka dapat dan mampu mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka mau dan dapat mengambil keputusan sendiri.”

Dia menambahkan bahwa pemerintah Bangladesh telah menyiapkan pendidikan gratis untuk para perempuan Bangladesh hingga mereka lulus. Pemerintah Bangladesh menghitung bahwa sebanyak 133,000

perempuan Bangladesh akan menerima kenuntungan dari adanya program yang direncanakan oleh pemerintah. Disisi lain Pemerintah Bangladesh telah membuka peluang kerja sebanyak 60% untuk perempuan muda sehingga mereka mampu untuk melindungi dirinya dari pernikahan dini dengan bekerja seperti sebagai pengajar guru SD yang kebanyakan merupakan perempuan-perempuan muda (Bashar, 2014).

Sama halnya dengan Girls Not Brides, yang merupakan organisasi non pemerintah yang di undang dalam konferensi ini. Dalam konferensi ini Girls Not Brides berbanding lurus dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Pemerintah Bangladesh dalam penanganan pernikahan dini. Komitmen-komitmen GNB dalam penanganan pernikahan dini pada konferensi ini antara lain:

- a. Membuka dan Meningkatkan Gerakan

- b. Bantuan Identifikasi dalam pekerjaan serta cara pengukuran pekerjaan
- c. Mempertahankan Pemerintah yang bertanggungjawab
- d. Memperluas Pendanaan
- e. Meningkatkan Janji dan Upaya Nasional

Untuk merealisasikan komitmen Pemerintah Bangladesh dan GNB pada poin ketiga dalam penanganan pernikahan dini, GNB membuat program di seperti, Pemberdayaan Perempuan, merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh GNB untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang telah dan belum mengalami pernikahan dini di Bangladesh. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memperoleh kendali lebih besar atas pilihan-pilihan kehidupan strategis, termasuk waktu dan keadaan pernikahan mereka, kesehatan seksual dan reproduksi mereka, dan kualitas hubungan mereka.

Dalam hal ini ada tiga langkah pokok agar pemberdayaan perempuan dapat tercapai dengan maksimal seperti transformasi internal, akses ke alternatif perkawinan atau peluang di luar pekerjaan

rumah tangga seperti pendidikan atau pekerjaan atau kegiatan simpan pinjam, mampu memengaruhi orang lain dengan meningkatkan mobilitas, visibilitas, dan suaranya di rumah dan di komunitasnya (Warner, 2014).

Seperti komunitas Girl' Club, komunitas tersebut merupakan komunitas yang dibentuk oleh perempuan-perempuan Bangladesh yang telah atau belum mengalami pernikahan dini. Di klub ini mengajarkan bagaimana perempuan untuk tidak berputus asa karena mengalami pernikahan dini, bahwa perempuan yang telah menikah bisa dan dapat menghentikan pernikahan dini untuk teman-temannya yang lain.

Klub ini menyajikan beberapa kegiatan seperti membaca, bersosialisasi, bermain game dan berdiskusi terbuka tentang masalah-masalah pribadi dan sosial dengan teman-teman sebaya mereka sehingga mereka bisa dan mampu untuk menyampaikan pendapat mereka tentang pernikahan dini kepada keluarga mereka dengan didampingi dan disediakan tempat yang aman oleh Girls Not Brides (Girls Not Brides, 2018).

3. Bangladesh Girls Summit 2014
INGO/NGO bersama-sama dengan Pemerintah Bangladesh mengadakan Bangladesh Girls Summit 2014 pada bulan Oktober yang dilaksanakan di Osmani Memorial Auditorium, Dhaka. Dalam konverensi ini Girls Not Brides merupakan salah satu dari 23 organisasi lainnya yang mendirikan Konverensi Bangladesh Girls Summit yang disebut dengan Komite Nasional. Konverensi ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan anak perempuan untuk mencegah pernikahan dini. (BRAC, Bangladesh Girl Summit 2014 Pledges concerted effort to end child marriage, 2014).

Sebelum diadakan konferensi Bangladesh Girls Summit, pada bulan September Kabinet Bangladesh menyetujui untuk menurunkan umur minimal pernikahan bagi perempuan yaitu 18 tahun menjadi 16 tahun (Girls Not Brides).

Pemerintah Bangladesh berangapan bahwa menurunkan usia minimal pernikahan untuk

perempuan dapat melindungi perempuan dari adanya ancaman-ancaman kekerasan seksual dan pernikahan. Namun hal ini tentu membuat berbagai macam tentangan terutama dari kalangan INGO/INGO salah satunya GNB. Menanggapi hal tersebut Kofi Annan selaku ketua The Edlers, dan pendiri GNB memberikan pernyataan bahwa menurunkan usia minimum pernikahan merupakan langkah salah yang dipilih oleh Bangladesh. Kofi mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Bangladesh yang berisi:

“Kami memuji Anda atas komitmen yang Anda buat untuk menangani pernikahan anak di Bangladesh pada bulan Juli tahun ini di Girl Summit perdana, dan karena menjadi tuan rumah Summit Girl Bangladesh pada bulan Oktober. Dengan mengakhiri pernikahan anak, ada sedikit keraguan bahwa Bangladesh akan mencapai masa depan yang lebih sehat, lebih aman dan lebih sejahtera untuk semua warga negaranya. Anak perempuan yang sudah menikah dan putus sekolah tidak berkontribusi pada kemakmuran dan kesejahteraan Bangladesh. Dimana anak yang berusia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian serta bila selamat akan mengalami resiko tinggi terkena komplikasi. Bangladesh telah membuat kemajuan yang mengesankan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak selama dekade terakhir, tetapi

kemajuan ini akan terhambat jika proposal untuk mengurangi usia pernikahan dilegalkan. Pada 2011, kami memprakarsai Girls Not Brides, sebuah kemitraan global yang telah berkembang menjadi lebih dari 400 organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mengakhiri pernikahan anak dan memungkinkan anak perempuan untuk memenuhi potensi mereka. Anggota bermarkas di lebih dari 60 negara, termasuk Bangladesh. Kami meluncurkan Girls Not Brides dengan keyakinan bahwa mengakhiri masalah yang lazim seperti pernikahan anak hanya dapat dicapai dalam kemitraan. Kami mendorong Anda untuk bekerja dengan organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan lainnya saat Anda mengembangkan dan memberikan sumber daya rencana aksi nasional untuk mengakhiri pernikahan anak. Bangladesh memiliki peluang untuk memimpin dalam upaya mengatasi masalah global ini dengan menunjukkan apa yang dapat dilakukan untuk mengakhiri pernikahan anak dan mengamankan masa depan yang lebih baik untuk anak perempuan” (Girls Not Brides, 2014).

Hal ini tidak memberikan respon positif dimana Pemerintah Bangladesh mempertahankan usia minimal pernikahan yaitu 16 tahun diberikan kepada perempuan yang ingin menikah dengan kasus tertentu. Hal ini lah yang tepat membuat kekhawatiran bagi GNB. Hingga pada tahun 2016 Pemerintah Bangladesh mempertimbangan Undang-undang pernikahan dini

tahun 2016 dengan tetap mempertahankan usia minimal 16 tahun untuk menikah bagi wanita untuk kasus tertentu. GNB sebagai salah satu partner Pemerintah Bangladesh mengirimkan draft proposal yang berisikan:

- a. Komitmen untuk menghapuskan pernikahan dini pada 2021 untuk anak berusia 15 tahun dan tingkat pernikahan anak pada rentan usia 15-18 tahun akan berkurang sepertiganya. Komitmen tersebut tidak konsisten dengan ketentuan keadaan khusus/tertentu.
- b. Ketentuan keadaan khusus bertentangan dengan Konstitusi Bangladesh — yang menjamin khususnya melindungi hak-hak dasar warga negara, kesetaraan di muka hukum (Pasal 27), tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Pasal 28) dan kebebasan berpendapat.
- c. Ketentuan keadaan khusus bertentangan dengan CEDAW 1979 dan UNCRC 1989. Bangladesh salah

satu negara yang menandatangani UNCRC yang mendefinisikan usia anak 18 tahun, Kebijakan Anak Nasional 2011 dan Undang-Undang Anak 2013 menganggap orang di bawah 18 tahun sebagai anak. Ketentuan khusus dengan demikian bertentangan dengan hukum nasional yang menentukan usia dan tanggung jawab terkait anak di bawah umur.

- d. Menurut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Pencegahan dan Perlindungan 2010), siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun adalah seorang anak. Membiarkan pernikahan di bawah 18 tahun dalam keadaan apa pun harus dianggap mendorong pernikahan anak, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan bentuk kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Menurut Pencegahan Penindasan Terhadap Perempuan dan Anak-anak (diamandemen) Act 2003, hubungan seksual dengan seorang gadis di bawah usia 16, dengan atau tanpa persetujuannya, akan dianggap sebagai pemerkosaan. Karena itu,

ketentuan "keadaan khusus" akan melegalkan pemerkosaan anak melalui pernikahan. Pemerkosa dan pelaku akan melegalkan kejahatan mereka dengan menerapkan ketentuan keadaan khusus tersebut.

- e. Menurunkan usia pernikahan anak perempuan akan berdampak negatif pada kesehatan anak perempuan, pendidikan dan proses pemberdayaan mereka, pada saat yang sama, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak akan meningkat. Anak perempuan akan hamil pada usia yang belum matang, memiliki risiko kematian ibu dan bayi, kanker serviks dan putus sekolah bagi anak perempuan akan meningkat dan kontribusi perempuan untuk pembangunan di negara ini akan terbatas. Keputusan seperti itu berbahaya bagi negara.
- f. Perkawinan di usia muda dengan menunjukkan akta kelahiran palsu akan menciptakan tekanan ekstrem pada seorang gadis dengan tidak siap mental secara psikologis maupun fisik.

g. Ketentuan pernikahan dengan keadaan khusus merupakan bentuk dari diskriminasi gender, walaupun memiliki izin dari peradilan dan gadis itu sendiri dapat membuat pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang akan membuat kekerasan terhadap anak terjadi secara terus menerus (Girls Not Brides, 2016).

Setelah adanya proposal ini Pemerintah Bangladesh menerapkan usia minimum pernikahan menjadi 18 tahun bagi perempuan dan menerapkan memperbolehkan bagi perempuan yang ingin menikah dengan situasi khusus dibawah usia 18 tahun dengan langkah peradilan dan didampingi oleh kedua orangtua (IANS, 2014). Hukuman bagi pelanggaran pernikahan anak dalam Undang-undang pernikahan dini tahun 2016 juga meningkat yaitu sebanyak 100.000 Taka dan kurungan penjara 2 tahun. Hal ini jelas berbeda dengan Undang-undang pernikahan dini tahun 1929 yang

mana denda yang diberikan sebesar 10.000 Taka (Mamun, 2014).

F. Kesimpulan

Pernikahan dini yang terjadi di Bangladesh didorong oleh beberapa factor seperti kemiskinan, bencana alam, kurangnya pendidikan, dan pelecehan seksual. Setiap tahunnya negara ini mengalami kenaikan angka pernikahan dini hingga pada tahun 2013 negara Bangladesh menduduki negara kedua dengan angka tertinggi pernikahan dini yang ada di dunia. Hal inilah membuat GNB tertarik untuk membantu Negara Bangladesh agar tidak adanya praktek-praktek pernikahan dini yang merugikan anak-anak terutama perempuan. Kerjasama ini berbentuk konsep kerjasama kolaborasi kebijakan dan konferensi perlindungan anak dan perempuan dimana GNB dan

Pemerintah Bangladesh sama-sama membuat dan ikut terlibat dalam diskusi-diskusi seperti Workshop Theory of Change, Girls Summit 2014, Bangladesh Girls Summit 2014.

Dari diskusi-diskusi diatas baik GNB maupun pemerintah membuat program untuk menangani pernikahan dini, agar angka pernikahan dini menurun dan juga diiringi dengan komitmen tinggi dari kedua belah pihak dalam penanganannya. Hasil dari adanya kebijakan dari diskusi tersebut terlihat dari penurunan angka pernikahan dini dimana di tahun 2013 sebanyak 29% perempuan menikah dibawah usia

15 tahun dan 65% perempuan menikah dibawah 18 tahun sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 25 juta perempuan dibawah 15 tahun menurun menjadi 22% dan 59% untuk perempuan di bawah 18 tahun. Sehingga dapat dilihat bahwa 3 tahun angka penurunan pernikahan dini sebanyak 7% atau sebanyak 1.750.000 juta untuk usia dibawah 15 tahun dan 6% atau sebanyak 1.500.000 juta untuk usia dibawah 18 tahun. Sehingga dapat dibilang bahwa kerjasama antara GNB dan Pemerintah Bangladesh berhasil untuk menurunkan pernikahan dini.

Daftar Pustaka

- Ahmed, S., & Potter, D. M. (2006). *NGOs in International Politics*. USA: Kumarian Press.
- Alam, M.-U., Halder, A. K., Luby, S. P., Islam, M. K., Opel, A., Shoab, A. K., et al. (2014). *Menstrual hygiene management knowledge, facilities, and practices associated with school absence among Bangladeshi adolescent girls*. Dhaka: icddr,b; Water Aid.

- Alamgir, R., & Chaity, A. J. (2017). *Child Marriage Restraint Act 2017 to practise no restraint*. Dhaka: Dhaka Tribune.
- Ali, M. I. (2013). *Child Marriage in Bangladesh: A Harmful Traditional Practice* . 14.
- Assembly, G. (1989). *Convention on the Rights of the Child* . 1.
- Azim, T., Khan, S. I., Haseen, F., Huq, N. L., Henning, L., Pervez, M. M., et al. (2018). *HIV and AIDS in Bangladesh* . *icddr,b* , 314.
- Azima. (2014, October 28). *Marry Before your House is Swept Away*. (H. R. Watch, Interviewer)
- Bashar, R. (2014). *Political commitment can end child marriages: Hasina*. London: bdnews24.com.
- BRAC. (2014, October 27). *Bangladesh Girl Summit 2014 Pledges concerted effort to end child marriage*. Retrieved October 26, 2018, from BRAC : <http://www.brac.net/latest-news/item/686-bangladesh-girl-summit-2014-pledges-concerted-effort-to-end-child-marriage>
- BRAC. (2014, October 26). *Bangladesh Girl Summit 2014 Pledges concerted effort to end child marriage*. Retrieved December 4, 2018, from <http://www.brac.net/latest-news/item/686-bangladesh-girl-summit-2014-pledges-concerted-effort-to-end-child-marriage>
- BRAC. (2013, September 6). *BRAC forms national alliance to eradicate child marriage*. Retrieved Desember 1, 2018, from BRAC: <http://www.brac.net/latest-news/item/632-brac-forms-national-alliance-to-eradicate-child-marriage>
- Brides, G. N. (n.d.). *ABOUT GIRLS NOT BRIDES*. Retrieved November 21, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/our-strategy/>
- BRIDES, G. N. (n.d.). *ABOUT GIRLS NOT BRIDES*. Retrieved November 21, 2018, from GIRLS NOT BRIDES: <https://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/>
- Brides, G. N. (2017). *Bangladesh*. Retrieved Desember 2, 2018, from Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage in the World: <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/bangladesh/>
- Brides, G. N. (2018). *BANGLADESH*. Retrieved November 25, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/national-partnerships/bangladesh/>
- Brides, G. N. (2014). *Bangladesh goverment reduce the minimum age's marriage from 18 to 16*. *Girls Not Brides* , 1.
- Brides, G. N. (2016). *BANGLADESH VOTES FOR CHILD MARRIAGE RESTRAINT ACT – GIRLS NOT BRIDES BANGLADESH REACTS*. Retrieved December 4, 2018, from

<https://www.girlsnotbrides.org/bangladesh-votes-child-marriage-restraint-act-girls-not-brides-bangladesh-reacts/>

- Brides, G. N. (2018). *Child marriage around the world: BANGLADESH*. Retrieved October 26, 2018, from GIRLS NOT BRIDES: <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/bangladesh/>
- Brides, G. N. (2018). *Empower Girls*. Retrieved November 26, 2018, from Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage: <https://www.girlsnotbrides.org/how-can-we-end-child-marriage/#empower-girls>
- Brides, G. N. (2017). FACILITATING DISCUSSIONS WITH YOUNG PEOPLE. *Girls Not Brides: The Global Partnership to end Child Marriage* , 1.
- Brides, G. N. (2018). *GHANA*. Retrieved November 25, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/national-partnerships/ghana/>
- Brides, G. N. (n.d.). *HOW CAN WE END CHILD MARRIAGE?* Retrieved October 30, 2018, from GIRLS NOT BRIDES: <https://www.girlsnotbrides.org/how-can-we-end-child-marriage/>
- Brides, G. N. (2018). *HOW GIRLS NOT BRIDES IS FUNDED*. Retrieved November 24, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/governance/girls-brides-funded/>
- Brides, G. N. (2018). *MOBILISE FAMILIES AND COMMUNITIES*. Retrieved November 26, 2018, from Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage : <https://www.girlsnotbrides.org/how-can-we-end-child-marriage/#mobilise-families-and-communities>
- Brides, G. N. (2018). *MOZAMBIQUE*. Retrieved November 25, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/national-partnerships/mozambique/>
- Brides, G. N. (2018). *NEPAL*. Retrieved November 2015, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/national-partnerships/nepal/>
- Brides, G. N. (2018). *Our Team*. Retrieved November 26, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/girls-brides-team/>
- Brides, G. N. (2017). *Press Release: Do not allow child marriage in “special cases”, urges Girls Not Brides Bangladesh*. Retrieved December 2, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/do-not-allow-child-marriage-under-special-circumstances-girlsnotbrides-bangladesh/>
- Brides, G. N. (2018). *The Netherlands*. Retrieved November 25, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/national-partnerships/the-netherlands/>

- Brides, G. N. (2018). *UGANDA*. Retrieved November 25, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/national-partnerships/uganda/>
- Brides, G. N. (2018). *United Kingdom*. Retrieved November 25, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/national-partnerships/united-kingdom/>
- Brides, G. N. (2018). *United State*. Retrieved November 25, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/national-partnerships/united-states/>
- Brides, G. N. (2014). *What is Girls Summit?* Retrieved Desember 2, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/girl-summit/>
- Commonwealth, T. (2018). *Bangladesh : Economy*. Retrieved December 3, 2018, from <http://thecommonwealth.org/our-member-countries/bangladesh/economy>
- commonwealth, T. (2018). *Bangladesh : History*. Retrieved November 23, 2018, from The commonwealth: <http://thecommonwealth.org/our-member-countries/bangladesh/history>
- Congress, U. L. (n.d.). *GEOGRAPHY*. Retrieved November 23, 2018, from Country Studies: <http://countrystudies.us/bangladesh/23.htm>
- Dickerman, K. (2016). *Within these walls: inside the legal brothels of Bangladesh*. Dhaka: Independent.
- Economics, F. (2018, March 7). *The Poorest Countries in the World*. Retrieved October 11, 2018, from Focus Economics: <https://www.focus-economics.com/blog/the-poorest-countries-in-the-world>
- Edlers, T. (2010). *Child Marriage*. Retrieved November 21, 2018, from The Edlers : Independent global leaders working together for peace and human right: <https://theelders.org/child-marriage>
- Ekert, B. (2014). The Global Partnership to End Child Marriage . *Girls Not Brides* , 1.
- Elders, T. (2011, September 20). *Girls Not Brides – a new global partnership to end child marriage*. Retrieved November 21, 2018, from The Elders : Independent global leaders working together for peace and human right: <https://theelders.org/article/girls-not-brides-new-global-partnership-end-child-marriage>
- Elders, T. (2007). *Who are The Elders?* Retrieved November 21, 2018, from The Elders : Independent global leaders working together for peace and human right: <https://theelders.org/about>
- Farhin, N. (2018, March 8). *Women in parliament: Impressive only in number*. Retrieved October 28, 2018, from Dhaka Tribune:

<https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/03/08/women-parliament-impressive-number>

Featherstone, R. H. (2014, October 27). *Bangladesh Girl Summit 2014*. Retrieved October 26, 2018, from GOV.UK: <https://www.gov.uk/government/speeches/bangladesh-girl-summit-2014>

Ferdaush, J., & Rahman, K. M. (2011). Gender Inequality in Bangladesh. *Unnayan Onneshan-The Innovators* , 13.

Ferdousi, N. (2013). Child marriage in Bangladesh: Socio-legal analysis . *International Journal of Sociology and Anthropology* , 2.

Foundation, T. C. (2011). *UPDATES ABOUT THIS COMMITMENT*. Retrieved November 25, 2018, from The Clinton Foundation: <https://www.clintonfoundation.org/clinton-global-initiative/girls-not-brides-partnership-end-child-marriage-2011>

Foundations, C. (2011). *Girls Not Brides: Partnership to End Child Marriage, 2011*. Retrieved November 17, 2018, from Clinton Global Initiative: <https://www.clintonfoundation.org/clinton-global-initiative/girls-not-brides-partnership-end-child-marriage-2011>

Girls Not Brides . (2014). *Provide Service*. Retrieved January 9, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#strategies-provide-services-background>

Girls Not Brides. (2014, November 6). *"Lowering the Marriage age in Bangladesh: A Step In Wrong Direction" Writes Kofi Annan*. Retrieved January 16, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/lowering-marriage-age-step-wrong-direction-kofi-annan-warns-bangladesh/>

Girls Not Brides. (2014). *A Theory Of Chang: The Problem* . Retrieved January 8, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#the-problem>

Girls Not Brides. (n.d.). *Bangladesh*. Retrieved January 16, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/bangladesh/>

Girls Not Brides. (2014). *Catalysing Strategy*. Retrieved January 8, 2018, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#catalysing-strategy>

Girls Not Brides. (2014). *Empower Girls*. Retrieved January 8, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#strategies-empower-girls>

Girls Not Brides. (2014). *Empower Girls*. Retrieved January 9, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#girls>

- Girls Not Brides. (2014). *Establish & Implement Laws & Policies*. Retrieved January 9, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#strategies-establish-and-implement-laws-and-policies-background>
- Girls Not Brides. (2014). *Establish & Implement Laws & Policies*. Retrieved January 9, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#outcomes-laws-and-policies>
- Girls Not Brides. (2012, February 2). *GIrls Not Brides Heads to India to Host Its First South Asia Regional Meeting*. Retrieved January 16, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/girls-not-brides-heads-to-india-to-host-its-first-south-asia-regional-meeting/>
- Girls Not Brides. (2014, July 22). *GIRL SUMMIT 2014: GIRLS NOT BRIDES COMMITS TO STRENGTHENING EFFORTS TO END CHILD MARRIAGE*. Retrieved January 8, 2019, from <https://www.girlsnotbrides.org/girl-summit-2014-girls-brides-commits-strengthen-efforts-end-child-marriage/>
- Girls Not Brides. (2018). *Meet Girls Taking on Taboos In Bangladesh*. Retrieved January 16, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/meet-the-girls-taking-on-taboos-in-bangladesh/>
- Girls Not Brides. (2014). *Mobilise Families and Communities*. Retrieved January 9, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#outcomes-families-and-communities>
- Girls Not Brides. (2014). *Mobilise Families & Communities*. Retrieved January 8, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#strategies-mobilise-families-and-communities-background>
- Girls Not Brides. (2014). *Provide Services*. Retrieved January 9, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#outcomes-services>
- Girls Not Brides. (2016, December 9). *Reconsider Child Marriage Restraint Act 2016 – Girls Not Brides Bangladesh to Prime Minister*. Retrieved January 16, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/do-not-allow-child-marriage-under-special-circumstances-girlsnotbrides-bangladesh/>
- Girls Not Brides. (2014). Theory of Change on Child Marriage. *Girls Not Brides* , 1.
- Girls Not Brides, I. (2016). Economic growth and workforce development. *Taking action to address child marriage* , 1.
- Gov UK. (2014, July). *About the Girl Summit 2014*. Retrieved January 7, 2018, from Gov.UK: <https://www.gov.uk/government/topical-events/girl-summit-2014/about>

- Government of the Peoples Republic of Bangladesh Ministry of Women and Children Affairs . (2010). English Version of the Domestic Violence (Prevention and Protection) Act. 1-12.
- Hadi, A., & Nurmandi, A. (2017). Pola Hubungan Politik Civil Society dan Pemerintah Lokal Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* , 2-3.
- Hamilton, H. (2014, November 22). *South Asian Government Commit to End Child Marriage*. Retrieved January 16, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/south-asian-governments-commit-end-child-marriage/>
- Hamman, L. (2014). Effects of Child Marriages in Bangladesh. *ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM* , 21.
- Hasan, M. (2018). *Report: Number of child marriages declines*. Dhaka: Dhaka Tribune.
- Human Right Watch. (2015, June 09). https://www.hrw.org/report/2015/06/09/marry-your-house-swept-away/child-marriage-bangladesh#_ftn29. Retrieved January 22, 2019, from Human Right Watch: https://www.hrw.org/report/2015/06/09/marry-your-house-swept-away/child-marriage-bangladesh#_ftn29
- IANS. (2014, November 24). *Bangladesh maintains 18 as minimum age of marriage for girls*. Retrieved January 16, 2019, from Business Standart: https://www.business-standard.com/article/news-ians/bangladesh-maintains-18-as-minimum-age-of-marriage-for-girls-116112400954_1.html
- Indonesia, K. K. (2018, May 24). *Ini Penyebab Stunting pada Anak*. Retrieved November 29, 2018, from Kementrian Kesehatan Republik Indonesia: <http://www.depkes.go.id/article/view/18052800006/ini-penyebab-stunting-pada-anak.html>
- Khan, D. H. (1995). GUIDELINES FOR GOOD POLICY AND PRACTICE . *Non-Governmental Organisations* , 45-46.
- Khatun, F., Khan, T. I., Pervin, S., & Jahan, H. (2005). Estimating Women's Contribution to the Economy : The Case of Bangladesh. *Centre for Policy Dialogue (CPD)* , 6.
- Kim, Y. (2011). The Unveiled power of NGOs: how NGOs influence states' foreign policy behaviors . *University of Iowa* , 32.
- Malhotra, A. (2010). *The Causes, Consequences and Solutions to Forced Child Marriage in the Developing World*. Washington D.C: International Center for Research on Women .
- Mamun, S. (2014, November 24). *Child Marriage Restraint Act 2016 gets final nod*. Retrieved January 16, 2019, from Dhaka Tribune:

<https://www.dhakatribune.com/uncategorized/2016/11/24/child-marriage-restraint-act-2016-gets-final-nod>

- Ministry of Women and Children Affairs Bangladesh. (2013). Overview of Violence Againsts Women and Children . *National Action Plan to Prevent Violence Againsts Women and Children* , 10-11.
- Nations, U. (n.d.). Bangladesh Country Profile. 1.
- Odhikar. (2011). Retrieved November 29, 2018, from HUMAN RIGHTS REPORT: www.odhikar.org/documents/2011/English/Human_Rights_Report_2011.pdf
- Orange, M. v. (2015). *Ending child marriage in Bangladesh and beyond* . Bangladesh: Al Jazeera .
- Patton, G. (2012). "Marrying too young: end child marriage." . *United Nations Population Fund (UNFPA)* , 6.
- Pradhan, M., Fellow, W. a., Justice, A. G., & School, C. L. (2013). Child Marriage in Bangladesh: occurrence and links to sexual harassment. *AVON Global Center for Women and Justice* , 5.
- Rahman, M. (2014, July 19). *PM to lead Bangladesh delegation at Girls Summit*. Retrieved Desember 2, 2018, from Gulf Times: <https://www.gulf-times.com/story/401022/PM-to-lead-Bangladesh-delegation-at-Girl-Summit>
- Richard, R. M. (1977). A Foreign Policy Model of U.S. Bilateral Aid Allocation . *World Politics* , 58-86.
- Roy, I., & Sarker, A. K. (2016). Early Marriage Impact on Female's Health and Their Satisfactory Level: A Distinctive Analytical Study in Bangladesh . *International Journal of Science and Research (IJSR)* , 364.
- Sayem, M. A. (2017). WOMEN PARTICIPATION IN HIGHER SECONDARY EDUCATION IN BANGLADESH. *International Journal of Education, Learning and Development* , 80.
- Stories, W. (n.d.). *Bangladesh* . Retrieved December 3, 2018, from Kids Out : The Fun & Happiness Charity: <http://worldstories.org.uk/countries/bangladesh/>
- Streatfield, P. K., & Karar, Z. A. (2008). Population Challenges for Bangladesh in the Coming Decades. *INTERNATIONAL CENTRE FOR DIARRHOEAL DISEASE RESEARCH, BANGLADESH* , 269.
- Suradi. (2003). Kolaborasi LSM Dengan Pemerintah: Kajian tentang Pengembangan Kolaborasi LSM dengan Pemerintah dalam Pembangunan Masyarakat . *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol. 8* , 74.
- UNICEF. (2015). Child Marriage. *UNICEF* , 1.

- UNICEF. (n.d.). Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak. *Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak* , 8.
- UNICEF. (2014). State of the World's Children 2015: Executive Summary. *UNICEF* , 60.
- UNICEF. (2016). The State of the World's Children.
- Union, I.-P. (2017). *Proportion of seats held by women in national parliaments (%)*. Retrieved October 28, 2018, from The World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS>
- UNPFA, ICRW, & Bangladesh, P. (2014). Ending Child Marriage in Bangladesh . *Theory of Change* , 3.
- Varia, N. (n.d.). Ending Child Marriage Meeting the Global Development Goals' Promise to Girls . *Human Right Watch* , 3.
- Verma, R., Sinha, T., & Khanna, T. (2013). Asia Child Marriage Initiative: Summary of Research in Bangladesh, India and Nepal. *Plan Asia Regional Office* , 12.
- Warner, A. (2014). *How Empowering Girls Can Help End Child Marriage*. Retrieved January 16, 2019, from Girls Not Brides: <https://www.girlsnotbrides.org/empowering-girls-can-help-end-child-marriage/>
- Watch, H. R. (2013). Marry Before Your House is Swept Away. *Human Rights Watch* , 1.
- Watch, H. R. (2015). Marry Before Your House is Swept Away. *Human Right Watch* .
- World, M. o. (2017, May 17). *Political Maps of Bangladesh*. Retrieved November 23, 2018, from Maps of World: <https://www.mapsofworld.com/bangladesh/bangladesh-political-map.html>
- Zimmermann, M., Glombitza, K.-F., & Rothenberge, B. (2010). Disaster Risk Reduction Plan for Bangladesh 2010-2012. *Swiss Agency for Development and Cooperation* , 3.